



**Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN – PT NO: 3095/SK/BAN-PT/AKRED/S/VIII/2019*

**Upaya Project Hope dan Gift of The Givers dalam  
Penanggulangan Bencana di Palu, Indonesia pada 2018**

Skripsi

Oleh

Dinar Afina Dwiputri

6091801044

Bandung

2022



**Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN – PT NO: 3095/SK/BAN-PT/AKRED/S/VIII/2019*

**Upaya Project Hope dan Gift of The Givers dalam  
Penanggulangan Bencana di Palu, Indonesia pada 2018**

Skripsi

Oleh

Dinar Afina Dwiputri

6091801044

Pembimbing

Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D.

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Dinar Afina Dwiputri  
Nomor Pokok : 6091801044  
Judul : Upaya Project Hope dan Gift of The Givers dalam  
Penanggulangan Bencana di Palu, Indonesia pada 2018

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana

Pada Senin, 10 Januari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

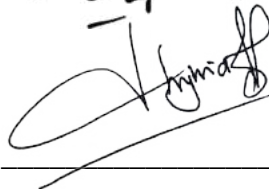
**Ketua sidang merangkap anggota**

Elisabeth A. Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D.

: 

**Sekretaris**

Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D.

: 

**Anggota**

Mireille Marcia Karman, S.IP., M.Litt.,

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dinar Afina Dwiputri  
NPM : 6091801044  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Upaya Project Hope dan Gift of The Givers dalam Penanggulangan Bencana di Palu, Indonesia pada 2018

Dengan ini menyatakan bahwa rancangan penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 16 Desember 2021



Dinar Afina Dwiputri

## Abstrak

Nama : Dinar Afina Dwiputri

NPM : 6091801044

Judul : Upaya Project Hope dan Gift of The Givers dalam Penanggulangan Bencana di Palu, Indonesia pada 2018

---

Pada 2018, runtutan bencana – gempa, tsunami, dan likuifaksi – terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Berkontradiksi dengan tindakan pada umumnya, Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi yang membatasi pekerja NGO dan relawan asing dalam memberikan bantuan. Meskipun begitu, Project Hope dan Gift of The Givers masih bisa memberikan bantuan. Berangkat dari kenyataan tersebut, muncul pertanyaan: bagaimana upaya Project Hope dan Gift of The Givers menanggulangi bencana Palu 2018 di bawah regulasi pembatasan NGO dan relawan asing yang diimplementasikan Pemerintah Indonesia?

Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Project Hope dan Gift of The Givers, peneliti menggunakan konsep peran NGO dalam penanggulangan bencana yang dikembangkan oleh Rajib Shaw. Pada tahapan sebelum bencana, NGO berperan untuk meningkatkan kesadaran, kesiapan, dan mitigasi dari masyarakat. Pada tahapan saat bencana, NGO berperan untuk melakukan operasi penyelamatan dan bantuan. Sedangkan pada tahap setelah bencana, peran yang dijalankan NGO adalah dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Peneliti mendapatkan bahwa upaya yang dilakukan kedua NGO terdampak regulasi, hanya saja terdapat perbedaan dari efek yang dirasakan. Dalam hal ini, Gift of The Givers berupaya dalam melakukan pencarian korban dan jenazah serta memberikan bantuan medis secepatnya sebelum regulasi dikeluarkan. Setelah regulasi diterapkan, bantuan langsung dihentikan dan kemudian bantuan logistic disalurkan melalui NGO lokal. Sedangkan untuk Project Hope, bantuan yang diberikan dari awal tahap tanggap darurat hingga fase rehabilitasi tahap setelah bencana adalah bantuan medis bagi masyarakat terdampak. Hal ini dilakukan oleh Project Hope dengan mengubah sistem pada setiap fase penanggulangan bencana dan mengubah rencana untuk tim medis asing.

**Kata kunci: regulasi pembatasan, penanggulangan bencana, INGO**

## *Abstract*

*Name : Dinar Afina Dwiputri*

*Student ID : 6091801044*

*Title : Project Hope and Gift of The Givers Attempt on Disaster Management for Palu, Indonesia in 2018*

---

*In 2018, a train of disaster – earthquake, tsunami, and liquefaction – happened in Palu, Centre of Sulawesi. Contrary to the common act, Indonesia's Government implemented a regulation which restricts foreign NGO and volunteers in giving aid. However, Project Hope and Gift of The Givers could still help the affected community. Seeing that reality, a question arises: how did Project Hope and Gift of The Givers cope with disaster management in the 2018 Palu disaster under regulation restricting foreign NGO and volunteers which Indonesia's Government implemented?*

*To answer the question, the author uses INGO roles in disaster management concept explained by Rajib Shaw. In the first stage, which is the pre-disaster, INGO roles are to increase awareness, preparedness, and mitigation for the community. In the second stage, disaster stage, INGO roles are to do rescue and relief operations. The last stage, which is the post-disaster, the roles for INGO are rehabilitation and reconstruction.*

*The author found that both INGOs are affected by the implementation of the regulation. Though, the intensity of the effect is different. Before the regulation issued, Gift of The Givers did a search operation for victims and corpses also giving immediate medical treatment for victims and injured people. After the regulation issued, the operation is stopped and replaced by distributing logistic aid through local NGO. As for Project Hope, from the very beginning of emergency response phase until rehabilitation phase in post-disaster, the team gave a medical assistance for affected communities. This carried out by changing the medical assistance system every phase and replace the plan on dispatch foreign medial team.*

***Keywords: restriction regulatory, disaster management, INGO***

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Project Hope dan Gift of The Givers dalam Penanggulangan Bencana di Palu, Indonesia pada 2018”. Penelitian ini dilakukan sebagai syarat kelulusan untuk menyelesaikan studi sarjana dalam jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan. Semoga melalui skripsi ini, pembaca bisa mendapatkan perspektif dan pengetahuan baru mengenai INGO dan perannya dalam upaya penanggulangan bencana di bawah situasi-situasi tertentu.

Pada umumnya, ketika terjadi bencana, pemerintah akan membuka dirinya untuk menerima bantuan. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan kebutuhannya, seperti kebutuhan medis atau pun logistik, terutama yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Sebagai contoh, tindakan ini dilakukan oleh Pemerintah Selandia Baru pada gempa bumi 2011, Pemerintah Filipina saat badai Tembin 2017, Pemerintah Jepang saat banjir di 2018. Di tahun yang sama, Indonesia juga dilanda oleh runtutan bencana di Palu. Pada awalnya Pemerintah Indonesia membuka diri bagi komunitas internasional untuk memberikan bantuan, tetapi tidak lama regulasi pembatasan NGO dan relawan asing dikeluarkan. Hal ini kemudian menyebabkan banyak INGO dan relawan yang meninggalkan daerah terdampak. Melalui skripsi ini, peneliti akan membahas tentang upaya yang dilakukan oleh dua INGO di bawah regulasi pembatasan NGO dan relawan asing yang diimplementasikan Pemerintah Indonesia.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu banyak hal-hal yang menjadi sebuah pembelajaran baru bagi peneliti. Oleh karena itu, peneliti memohon maaf jika terdapat kesalahan-kesalahan. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti sangat terbuka bagi kritik dan saran dari pembaca untuk membangun peneliti menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Bandung, 16 Desember 2021

## **Ucapan Terima Kasih**

Skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa ada bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga dengan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu, Ayah, Ka Nisa dan Sandra. Terima kasih banyak untuk terus menjadi sumber semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Mba Sylvia yang telah membimbing saya dalam menulis skripsi ini. Terima kasih banyak atas saran, ide-ide, dan kebaikan mba selama proses penulisan skripsi ini.
3. Gaby dan Selva yang sudah mendengarkan dan memberikan semangat selama proses penulisan skripsi ini.
4. Teman-teman seperbimbingan yang telah membantu dan menjadi tempat mengeluh.



## Daftar Isi

<b>Abstrak</b> .....	i
<i>Abstract</i> .....	ii
<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>Ucapan Terima Kasih</b> .....	iv
<b>Daftar Isi</b> .....	v
<b>Daftar Tabel</b> .....	vii
<b>Daftar Gambar</b> .....	viii
<b>Daftar Singkatan</b> .....	ix
<b>BAB I: Pendahuluan</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.2.1. Deskripsi Masalah .....	7
1.2.2. Pembatasan Masalah.....	11
1.2.3. Pertanyaan Penelitian.....	12
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2. Kegunaan Penelitian .....	12
1.4. Tinjauan Pustaka.....	13
1.5. Kerangka Pemikiran .....	18
1.6. Metode Penelitian, Jenis Penelitian, dan Teknik Pengumpulan Data ....	22
1.6.1. Metode Penelitian .....	22
1.6.2. Jenis Penelitian .....	22
1.6.3. Teknik Pengambilan Data.....	23
1.7. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II: Project Hope dan Gift of The Givers</b> .....	25
2.1. Project Hope .....	26
2.1.1. Visi dan Misi Project Hope .....	26
2.1.2. Latar Belakang Project Hope .....	27
2.1.3. Project Hope di Indonesia .....	30
2.2. Gift of The Givers.....	31
2.2.1. Visi Gift of The Givers .....	31

2.2.2.	Latar Belakang Gift of The Givers .....	32
2.2.3.	Gift of The Givers di Indonesia.....	36
<b>BAB III: Regulasi Pembatasan Bantuan, NGO, dan Relawan Asing oleh Pemerintah Indonesia .....</b>		<b>38</b>
3.1.	Penetapan Regulasi .....	39
3.2.	Latar Belakang Penetapan Regulasi .....	50
3.2.1.	Perubahan Sistem Manajemen Bencana .....	50
3.2.2.	Strategi Politik.....	56
3.2.3.	Strategi Keamanan.....	60
<b>BAB IV: Upaya Penanggulangan Bencana oleh Project Hope dan Gift of The Givers Di Bawah Regulasi Pembatasan NGO dan Relawan Asing.....</b>		<b>64</b>
4.1.	<i>Pre-disaster: Mitigation, Preparedness, and Awareness</i> .....	64
4.2.	<i>During Disaster: Rescue and Relief Operation</i> .....	67
4.2.1.	<i>Rescue Operation</i> .....	68
4.2.2.	<i>Relief Operation</i> .....	77
4.3.	<i>Post-disaster: Rehabilitation and Reconstruction</i> .....	79
4.3.1.	<i>Rehabilitation</i> .....	80
4.3.2.	<i>Reconstruction</i> .....	82
<b>BAB V: Kesimpulan .....</b>		<b>88</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>		<b>93</b>
<b>Lampiran.....</b>		<b>111</b>

## Daftar Tabel

Tabel 2.1. Pengaruh Project Hope per Dekade .....	29
Tabel 2.2. Bantuan Bencana yang diberikan Gift of The Givers .....	34
Tabel 4.1. Upaya Gift of The Givers dan Yayasan Project Hope Indonesia di bawah Regulasi Pembatasan NGO dan Relawan Asing .....	77

## **Daftar Gambar**

Gambar 3.1. Sebelum dan Sesudah Tsunami di Palu 2018 .....	40
Gambar 3.2. Sebelum dan Sesudah Likuifaksi di Palu, 2018 .....	41
Gambar 3.3. Regulasi Pembatasan Bantuan NGO Asing dalam Bencana Palu 2018 .....	45

## Daftar Singkatan

NSAs	: Aktor Non-Negara
Bakornas PB	: Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
Bappeda	: Badan Pembangunan Daerah
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BRR	: Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
IHRL	: Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
IASC	: <i>Inter-Agency Standing Committee</i>
IFRC	: <i>The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies</i>
INGO	: Organisasi Non-Pemerintah Internasional
JRCS	: Japan Red Cross Society
NGO	: Organisasi Non-Pemerintah
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perpres	: Peraturan Presiden
PMI	: Palang Merah Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PRC	: <i>Philippines Red Cross</i>
RPBN	: Rencana Penanggulangan Bencana Nasional
SBY	: Susilo Bambang Yudhoyono
UNDP	: Program Pembangunan Persatuan Bangsa-Bangsa
UU	: Undang-Undang

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada umumnya, negara yang terkena bencana akan melakukan segala hal untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi. Sering kali, pemerintah membuka negara untuk menerima bantuan agar warga terdampak bisa dilindungi, dijaga, dan dibantu. Berdasarkan penjelasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015, Komisi Hukum Internasional pada 2016, dan *Inter-Agency Standing Committee* (IASC) pada 2011 tugas utama negara terdampak adalah untuk melindungi warga dan wilayahnya, menyediakan bantuan, dan terlibat langsung dalam pencegahan risiko bencana.<sup>1</sup> Negara memiliki kekuasaan penuh untuk mengelola tindakan dalam penanganan bencana.

Hanya saja, banyak kasus menunjukkan ketidakmampuan negara untuk menyediakan bantuan secara penuh. Oleh sebab itu, negara lain dan lembaga atau organisasi asing sering kali menawarkan bantuan untuk membantu warga dan pemulihan daerah terdampak. Meningkatnya peran dari Organisasi Internasional menjadi sorotan bagi PBB. Badan Hak Asasi Manusia PBB menyebutkan bahwa peran Organisasi Non-Pemerintah (NGO) memiliki kekhususan tersendiri berkaitan dengan bantuan bencana dan kemanusiaan dalam waktu darurat.<sup>2</sup> Saling bergantungnya antar aktor sangat terlihat dalam masa-masa seperti bencana alam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peristiwa di berbagai negara.

---

<sup>1</sup> Marlies Hesselman dan Lottie Lane, “Disasters and Non-State Actors - Human Rights-Based Approaches,” *Disaster Prevention and Management* Vol. 26, no. 5 (2017), <https://doi.org/10.1108/DPM-07-2017-0174>.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Pada 2011, salah satu wilayah dengan penduduk terpadat yang juga merupakan pusat bisnis di Selandia Baru diguncang gempa bumi dengan kekuatan 6,3 skala Richter. Bencana ini menyebabkan 185 orang meninggal dunia, lebih dari seribu orang luka-luka,<sup>3</sup> dan kerugian material yang cukup besar di mana lebih dari 50% bangunan di Christchurch mengalami kerusakan.<sup>4</sup> Pemerintah Selandia Baru kemudian membuka situasi darurat negara kepada dunia sehari setelah peristiwa tersebut, yakni pada tanggal 23 Februari 2011.<sup>5</sup> Pada peristiwa ini, Pemerintah Selandia Baru membuka negaranya karena Christchurch masih dalam masa pemulihan dari gempa September 2010.<sup>6</sup>

Salah satu organisasi internasional, *The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies* (IFRC), yang bekerja sama dengan pemerintah mendatangkan dua relawan ahli dalam penanganan bencana. IFRC juga mendatangkan 100 relawan dari *Lions International* sebagai hasil dari perjanjian antara keduanya.<sup>7</sup> Tidak hanya itu, pemerintah juga mendapatkan bantuan dari Toll Group, yang bekerja sama dengan perusahaan penerbangan dan pelayaran untuk mengantarkan bantuan berupa toilet kimia dan air bersih.<sup>8</sup> Pemerintah Korea Selatan juga ikut andil dalam memberikan bantuan yang diminta oleh Pemerintah Selandia Baru. Tidak hanya mengirimkan logistik, Pemerintah Korea Selatan juga

---

<sup>3</sup> Ministry for Culture and Heritage, "Christchurch Earthquake Kills 185," New Zealand History, 22 Februari 2011, <https://nzhistory.govt.nz/page/christchurch-earthquake-kills-185>.

<sup>4</sup> Phil Mercer, "New Zealand Remembers Catastrophic February 2011 Earthquake," VOA, 22 Februari 2021, <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/new-zealand-remembers-catastrophic-february-2011-earthquake>.

<sup>5</sup> Corinne Ambler, "New Zealand Red Cross Earthquake Response and Recovery," Australian Journal of Emergency Management, diakses pada 29 Maret 2021, <https://ajem.infoservices.com.au/items/AJEM-27-04-07>.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> "Providing Vital Aid after Christchurch Earthquake," Toll Group, diakses pada 29 Maret 2021, <https://www.tollgroup.com/news-and-media/case-studies/providing-vital-aid-after-christchurch-earthquake>.

mengirim dua ahli forensik untuk membantu badan forensik Selandia Baru dalam mengidentifikasi korban.<sup>9</sup>

Contoh lainnya adalah ketika badai Tembin, dikenal juga dengan Vinta, di Filipina terjadi pada 2017. Badai ini menyebabkan bencana lain, yakni banjir dan juga longsor. Runtutan bencana tersebut memakan korban jiwa lebih dari 200 orang dengan ratusan orang hilang terbawa banjir dan tanah longsor.<sup>10</sup> Ratusan ribu orang terpaksa harus mengungsi akibat tempat tinggal yang terendam dan/atau hancur oleh bencana-bencana tersebut.<sup>11</sup> Hal ini kemudian membawa Pemerintah Filipina untuk membuka negaranya terhadap bantuan dari negara dan organisasi internasional.

Uni Eropa memberikan bantuan kemanusiaan sebesar €570.000 untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang terdampak. Tidak hanya itu, AHA Centre juga memberikan bantuan pendampingan dan relawan ahli dalam manajemen bencana.<sup>12</sup> Pemerintah Australia bahkan membentuk program tersendiri dalam memberikan bantuan kepada Filipina. Program bantuan ini awalnya merupakan bantuan investasi yang akan berakhir pada 2015, tetapi menjadi mundur pada 2018 akibat sering terjadinya bencana di Filipina.<sup>13</sup> Sebanyak 135

---

<sup>9</sup> "Humanitarian Aid for Earthquake Victims in Christchurch, New Zealand - New Zealand," ReliefWeb, diakses pada 29 Maret 2021, <https://reliefweb.int/report/new-zealand/humanitarian-aid-earthquake-victims-christchurch-new-zealand>.

<sup>10</sup> Mattha Busby, "More than 200 Killed in Philippines Mudslides and Floods as Storm Hits," the Guardian, 24 Desember 2017, <https://www.theguardian.com/world/2017/dec/23/dozens-killed-in-philippine-mudslides-and-floods-as-storm-hits>.

<sup>11</sup> Felipe Villamor, "Tropical Storm in Philippines Kills More than 100 and Leaves Dozens Missing," *The New York Times*, 23 Desember 2017, sec. World, <https://www.nytimes.com/2017/12/23/world/asia/philippines-storm-tembin.html>.

<sup>12</sup> Risdianto Irawan, "Flash Update No. 7 Typhoon Tembin (Vinta, 33W)," AHA Centre, 24 Desember 2017, <https://ahacentre.org/flash-update/flash-update-no-7-typhoon-tembin-vinta-33w/>.

<sup>13</sup> "Philippines Aid Program Performance Report 2017-18," Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, diakses pada 29 Maret 2021, <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/philippines-aid-program-performance-report-2017-18>.



organisasi datang langsung untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak. Bahkan IFRC menyumbangkan CHF2,8 juta untuk membantu *Philippines Red Cross* (PRC).<sup>14</sup>

Tidak berbeda jauh dengan Selandia Baru dan Filipina, Jepang yang dilanda bencana banjir dan longsor pada 2018 juga membuka diri untuk bantuan internasional. Hujan besar terjadi dan menyebabkan banjir juga longsor. Peristiwa ini menyebabkan korban meninggal hingga lebih dari 200 orang, 21 orang dinyatakan hilang, dan ratusan ribu orang harus meninggalkan tempat tinggalnya.<sup>15</sup> Kerugian yang dialami oleh Jepang diperkirakan mencapai US\$9,86 milyar.<sup>16</sup> Pemerintah Jepang membuka negaranya untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan dari negara, organisasi internasional serta relawan dari berbagai negara. Hal ini dilakukan setelah badan penanggulangan bencana Jepang memberikan daftar hal-hal yang dibutuhkan.<sup>17</sup>

Organisasi Mercy Relief memberikan bantuan langsung berupa pemberian makanan bagi para pengungsi dan juga donasi sebesar SGD\$ 63.163.<sup>18</sup> IFRC pun memberikan bantuan berupa donasi yang disalurkan melalui *Japan Red Cross Society* (JRCS). JRCS pun membuka pendaftaran relawan ketika Pemerintah Jepang sudah dirasa siap menerima masuk bantuan tenaga relawan dengan regulasi

---

<sup>14</sup> "PHILIPPINES Tropical Storm Tembin," ACAPS, December 28, 2017, [https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/171228\\_start\\_acaps\\_briefing\\_note\\_philippines\\_tropical\\_storm.pdf](https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/171228_start_acaps_briefing_note_philippines_tropical_storm.pdf).

<sup>15</sup> Junko Ogura dan Joshua Berlinger, "More than 100 Dead as Heavy Rain Pounds Japan," CNN, 12 Juli 2018, <https://edition.cnn.com/2018/07/10/asia/japan-floods-intl/index.html>.

<sup>16</sup> "2018 Japan Flood Completion Report Final," *Mercy Relief*, diakses pada 29 Maret 2021, <https://www.mercyrelief.org/impact/financial-information/japan-flood-2018-completion-report-final/>.

<sup>17</sup> Robin Lewis, "Japan Floods 2018: How to Help," *Social Innovation Japan*, September 6, 2018, <https://medium.com/social-innovation-japan/japan-floods-2018-how-to-help-4b01515d1db3>.

<sup>18</sup> *Ibid.*

yang jelas.<sup>19</sup> Taiwan, Amerika Serikat, Tiongkok, Turki, dan Rusia merupakan beberapa diantara negara-negara yang memberikan bantuannya kepada Jepang setelah bencana terjadi. Bentuk bantuannya berupa donasi, relawan untuk membersihkan pemukiman warga, bahkan logistik kebutuhan pengungsi.<sup>20</sup>

Masifnya bencana alam juga bisa disebabkan oleh letak geografis negara. Dalam seluruh contoh kasus yang telah diceritakan, keempat negara tersebut termasuk ke dalam wilayah Cincin Api (*Ring of Fire*). Cincin Api sendiri merupakan jalur dengan lempeng tektonik yang paling tidak stabil. Selain itu, jalur ini juga menjadi tempatnya 95% gunung api di dunia. Dengan perkiraan panjang 40.000 km, negara-negara yang dilewati oleh Cincin Api adalah negara yang paling sering mengalami bencana gempa. 90% gempa terjadi pada lempengan bumi di jalur ini.<sup>21</sup> Cincin Api terbentang dari Barat Daya Amerika Selatan hingga Australia bagian barat. Di mana Indonesia termasuk ke dalamnya. Hal ini yang menyebabkan Indonesia sering mengalami bencana alam.<sup>22</sup>

Salah satu bencana yang sempat menjadi sorotan dunia adalah tsunami yang terjadi di Aceh pada 2004. Bencana ini terjadi akibat gempa di bawah laut yang berkekuatan sekitar lebih dari 9,0 skala Richter yang menyebabkan gelombang laut setinggi 20 meter menghantam daratan Aceh. Bahkan gempa tersebut tidak hanya memberikan dampak pada Aceh saja, tetapi hingga ke Sri

---

<sup>19</sup> “The Japanese Red Cross Society’s Response to Japan Floods and Landslides 2018 (as of 23<sup>rd</sup> July 2018),” JAPANESE RED CROSS SOCIETY, 24 Juli 2018, [https://www.jrc.or.jp/english/relief/180724\\_005361.html](https://www.jrc.or.jp/english/relief/180724_005361.html).

<sup>20</sup> Takashi Kawakami dan Ryotaro Sato, “Foreign Aid Rushes into Japan after Deadly Rains,” Nikkei Asia, 19 Juli 2018, <https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Foreign-aid-rushes-into-Japan-after-deadly-rains>.

<sup>21</sup> “Ring of Fire,” National Geographic (National Geographic Society), 9 Oktober 2012, <https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/ring-fire/>.

<sup>22</sup> Endra Sambodo, “Mengenal Lebih Jauh Tentang"Ring of Fire",” Kumparan, 11 Oktober 2018, <https://kumparan.com/hijab-lifestyle/mengenal-lebih-jauh-tentangring-of-fire-1539236305925178478/full>.

Lanka, Thailand, dan India Selatan.<sup>23</sup> Akibat peristiwa ini, terhitung sebanyak 230.000 orang meninggal dunia di 14 negara dengan Sumatera sebagai daerah yang terparah di mana 170.000 orang tewas.<sup>24</sup> Pada peristiwa ini, Pemerintah Indonesia membuka dirinya untuk mendapatkan bantuan internasional. Menurut Juru Bicara Menteri Luar Negeri Yuri Thamrin, sebanyak 18 negara memberikan bantuan – baik berupa alat transportasi, makanan, alat pemurni air, bahkan donasi langsung – yang disalurkan melalui organisasi internasional yang bekerja sama dengan organisasi domestik.<sup>25</sup>

Pada 28 November 2018 lalu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia diguncang oleh bencana. Tidak hanya gempa bumi, tapi juga tsunami dan likuifaksi yang menyebabkan sebanyak lebih dari 1.900 orang meninggal dunia, 5.000 orang dinyatakan hilang, dan sekitar 70.000 orang menjadi pengungsi.<sup>26</sup> Listrik dan juga pasokan air bersih terputus akibat pergerakan tanah yang merusak tiang listrik dan pipa air bersih. Tidak hanya itu, para petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beserta relawan sulit untuk memberikan bantuan karena akses yang terputus akibat tanah bercampur dengan lumpur.<sup>27</sup> Tidak sedikit dari negara

---

<sup>23</sup> Aswab Nanda Pratama, “26 Desember 2004, Gempa Dan Tsunami Aceh Menimbulkan Duka Indonesia.. Halaman All,” ed. Bayu Galih, *KOMPAS.com*, 26 Desember 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/26/11213301/26-desember-2004-gempa-dan-tsunami-aceh-menimbulkan-duka-indonesia?page=all>.

<sup>24</sup> Hendra Pasuhuk, “Apa Yang Sebenarnya Terjadi Dalam Tsunami 2004?,” *DW.com*, 20 Desember 2014, <https://www.dw.com/id/apa-yang-sebenarnya-terjadi-dalam-tsunami-2004/a-18141866>.

<sup>25</sup> “18 Negara Berikan Bantuan Ke Aceh,” *Tempo (TEMPO.CO)*, 30 Desember 2004, <https://nasional.tempo.co/read/54018/18-negara-berikan-bantuan-ke-aceh>.

<sup>26</sup> ABC, “Indonesia Perintahkan Pekerja Bantuan Asing Tinggalkan Palu,” *Tempo (TEMPO.CO)*, 9 Oktober 2018, <https://www.tempo.co/abc/2704/indonesia-perintahkan-pekerja-bantuan-asing-tinggalkan-palu>.

<sup>27</sup> “Indonesia Earthquake: Hundreds Dead in Palu Quake and Tsunami,” *BBC News*, 29 September 2018, sec. Asia, <https://www.bbc.com/news/world-asia-45683630>.

dan organisasi internasional menawarkan bantuan kemanusiaan kepada Indonesia, bahkan sebelum diumumkannya situasi darurat bencana.<sup>28</sup>

Dalam situasi bencana, banyak dari aktor yang terlibat dalam upaya penanggulangnya. Mulai dari negara lain hingga Organisasi Non-Pemerintah Internasional (INGO). Hanya saja, pemerintah memegang tugas utama dalam melakukan upaya penanggulangan bencana. Berkaitan dengan tugas negara, tentu akan ada upaya dan tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Hal-hal tersebut kemudian mempengaruhi aktor lain dalam penanggulangan bencana. Peristiwa inilah yang diperdalam melalui analisis skripsi.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

### **1.2.1. Deskripsi Masalah**

Berbeda dengan sistem penanggulangan bencana di Aceh pada 2004 yang terbuka terhadap bantuan asing, Indonesia memilih untuk mengimplementasikan sikap selektif. Tidak hanya itu, pemerintah juga menetapkan regulasi yang mempersulit NGO dan relawan asing dalam memberikan bantuan kemanusiaan dalam bencana di Palu pada 2018. Padahal, tidak sedikit dari warga yang terdampak oleh bencana tersebut. Seperti yang sudah disebutkan dalam latar belakang masalah, sebanyak 1.900 orang menjadi korban jiwa, 5.000 orang dinyatakan hilang, dan sekitar 70.000 orang menjadi pengungsi.<sup>29</sup>

Pengumuman situasi darurat bencana pun diberikan tiga hari setelah peristiwa dan baru membuka diri untuk bantuan kemanusiaan internasional

---

<sup>28</sup> “Indonesia Quake: Aid Groups Frustrated as Foreign Staff Told to Leave Palu,” SBS News, 9 Oktober 2018, <https://www.sbs.com.au/news/indonesia-quake-aid-groups-frustrated-as-foreign-staff-told-to-leave-palu>.

<sup>29</sup> *Ibid.*

setelahnya. Namun, daftar hal-hal yang dibutuhkan oleh negara masih belum rampung. Hal ini menyebabkan beberapa negara dan organisasi internasional memberikan hal-hal yang mereka interpretasikan sebagai hal yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak. Meskipun begitu, Indonesia memilih untuk menerapkan sikap selektif. Hal ini terlihat dari beberapa penolakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada negara yang memberikan bantuan tidak sesuai dengan daftar sementara yang diedarkan oleh BNPB. Penolakan ini terjadi pada Amerika Serikat yang menawarkan kapal rumah sakit bagi korban bencana.<sup>30</sup> Tidak hanya Amerika, satu pesawat asing yang membawa bantuan juga ditolak untuk mendarat di Palu.<sup>31</sup>

Setelah BNPB mengeluarkan enam hal utama yang dibutuhkan untuk masyarakat terdampak bencana, banyak dari negara dan organisasi internasional mengirimkan hal-hal tersebut. Di mana salah satu diantaranya adalah bantuan medis. 29 Negara menawarkan bantuan medis kepada Pemerintah Indonesia, namun pemerintah menolak beberapa bantuan tersebut dengan alasan bahwa bantuan tersebut bukan lagi prioritas dalam penanggulangan bencana di Palu.<sup>32</sup> Sebanyak 102 lembaga internasional pun menawarkan bantuannya, tapi hanya beberapa saja yang diberikan izin untuk membantu masyarakat.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Friski Riana dan Juli Hantoro, "JK: Indonesia Tolak Bantuan Dari as Untuk Gempa Donggala Dan Palu," Tempo (TEMPO.CO), 2 Oktober 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1132307/jk-indonesia-tolak-bantuan-dari-as-untuk-gempa-donggala-dan-palu/full&view=ok>.

<sup>31</sup> "Satu Pesawat Asing Bawa Bantuan Ditolak Mendarat Di Palu," CNN Indonesia, 1 Oktober 2018, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181001142002-92-334630/satu-pesawat-asing-bawa-bantuan-ditolak-mendarat-di-palu>.

<sup>32</sup> "Gempa Dan Tsunami Palu: Bantuan Internasional Berdatangan, Tapi Mengapa Bantuan Medis Tak Difasilitasi?," *BBC News Indonesia*, 4 Oktober 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45717773>.

<sup>33</sup> ABC, "Indonesia Perintahkan Pekerja Bantuan Asing Tinggalkan Palu," Tempo (TEMPO.CO), 9 Oktober 2018, <https://www.tempo.co/abc/2704/indonesia-perintahkan-pekerja-bantuan-asing-tinggalkan-palu>.

Tidak berselang lama, pada 9 Oktober 2018 Pemerintah bersama dengan BNPB menetapkan regulasi untuk relawan dan organisasi internasional.<sup>34</sup> Penetapan regulasi tersebut kemudian menyebabkan penolakan bantuan dan pengusiran relawan-relawan beserta petugas organisasi internasional yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat. Penolakan sangat terlihat setelah 22 relawan asing ditolak masuk ke Indonesia.<sup>35</sup> Para pekerja asing independen dan juga staf NGO yang tidak berafiliasi dengan lembaga atau organisasi lokal pun diperintahkan untuk kembali ke wilayahnya masing-masing.<sup>36</sup> Padahal masih terdapat sekitar 1.000 orang yang dinyatakan hilang pada saat regulasi tersebut ditetapkan.<sup>37</sup> Dari banyaknya NGO yang terdampak dari regulasi tersebut, peneliti akan mengangkat dua organisasi yang juga terdampak dari regulasi pembatasan. Meskipun begitu, kedua organisasi masih tetap memberikan bantuan.

Salah satu NGO asing yang diminta untuk pergi adalah Gift of The Givers yang berasal dari Afrika Selatan. Dalam hal ini, tim sudah berada di daerah terdampak sesudah permintaan dari Pemerintah Indonesia dan sebelum dikeluarkannya regulasi. Saat itu, sudah terdapat 27 relawan datang bersama dengan pengalaman dan keterampilan yang memadai untuk memberikan bantuan

---

<sup>34</sup> “Situation Update No. 12,” *AHA Centre* (AHA Centre), 15 Oktober 2018, [https://ahacentre.org/wp-content/uploads/2018/10/AHA-Situation\\_Update-no12-Sulawesi-EQ-rev.pdf](https://ahacentre.org/wp-content/uploads/2018/10/AHA-Situation_Update-no12-Sulawesi-EQ-rev.pdf).

<sup>35</sup> Firtia Chusna Farisa dan Inggried Dwi Wedhaswary, “22 Relawan Asing Ditolak Masuk Palu, Ini Alasannya,” *KOMPAS.com*, 12 Oktober 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/12/08391031/22-relawan-asing-ditolak-masuk-palu-ini-alasannya?page=all>.

<sup>36</sup> ABC, “Indonesia Perintahkan Pekerja Bantuan Asing Tinggalkan Palu,” *Tempo* (TEMPO.CO), 9 Oktober 2018, <https://www.tempo.co/abc/2704/indonesia-perintahkan-pekerja-bantuan-asing-tinggalkan-palu>.

<sup>37</sup> “Indonesia Quake: Aid Groups Frustrated as Foreign Staff Told to Leave Palu,” *SBS News*, 9 Oktober 2018, <https://www.sbs.com.au/news/indonesia-quake-aid-groups-frustrated-as-foreign-staff-told-to-leave-palu>.

pencarian korban dan jenazah.<sup>38</sup> Namun, setelah adanya regulasi, tim diminta untuk keluar dari daerah terdampak dan kembali ke negara asal.<sup>39</sup> Organisasi lain yang terkena dampak dari penetapan regulasi pembatasan bantuan, NGO, dan relawan asing adalah Project Hope. Dalam hal ini, Project Hope Indonesia masih baru berdiri dan di bawah pengawasan kantor pusat Project Hope di Virginia, Amerika Serikat. Sehingga mereka dikirimkan tenaga ahli asing untuk membantu dalam melakukan penanggulangan bencana. Mereka juga pada awalnya berencana untuk menerbangkan tenaga medis asing. Namun, kemudian regulasi keluar dan mengganti tenaga medisnya menjadi tenaga medis lokal.<sup>40</sup>

Alasan peneliti menggunakan kedua INGO, yakni selain karena mereka pernah memberikan bantuan kepada Indonesia sebelumnya, dampak yang dirasakan dari regulasi cukup berbeda bagi keduanya. Pemilihan Project Hope dalam penelitian ini adalah karena ketertarikan peneliti dari bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak, yakni bantuan medis. Hal yang menarik adalah bahwa Pemerintah Indonesia sempat menolak bantuan medis karena dirasa sudah tidak dibutuhkan, Tetapi Project Hope masih tetap dapat memberikan bantuannya. Selain itu, mereka juga memiliki tenaga ahli asing yang tetap bisa berada di daerah terdampak dan tidak diminta untuk keluar. Sedangkan untuk Gift of The Givers sendiri, tim memiliki pengalaman, keterampilan dan alat yang memadai untuk mencari jenazah dan korban tapi tetap diminta untuk keluar dari daerah terdampak.

---

<sup>38</sup> Naledi Shange, "Gift of Givers Team Still in Indonesia despite Halt to Search and Rescue Efforts," TimesLIVE, 10 Oktober 2018, <https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2018-10-10-gift-of-givers-team-still-in-indonesia-despite-halt-to-search-and-rescue-efforts/>.

<sup>39</sup> AFP, "Aid Groups Frustrated as Foreign Staff Told to Leave Palu," dawn.com, 9 Oktober 2018, <https://www.dawn.com/news/1437869>.

<sup>40</sup> Cinira Baldi, "Field Update: The Devastation in Palu, Indonesia Lives On," Project HOPE, 26 September 2019, <https://www.projecthope.org/cinira-baldi-visits-palau/09/2019/>.

Tidak hanya itu, tim juga telah memenuhi persyaratan untuk memberikan bantuan sebagai NGO asing. Tim telah bekerja sama dengan NGO lokal dan juga melapor kepada BNPB sebagai lembaga yang memiliki kendali dalam penanggulangan bencana.

Meskipun pada umumnya negara yang terkena bencana alam akan menerima bantuan demi membantu masyarakatnya yang terdampak sebagai bentuk perlindungan dan penjagaan terhadap warganya, Indonesia tetap mengimplementasikan sikap selektif dan bahkan menetapkan regulasi yang mempersulit bantuan kemanusiaan dari NGO dan relawan asing. Hal ini tentu saja berpengaruh pada gerak NGO dan relawan dalam memberikan bantuannya. Dengan adanya regulasi, upaya yang dilakukan oleh NGO dalam penanggulangan bencana pun menjadi lebih terbatas.

### **1.2.2. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada NGO. Lebih spesifiknya adalah Project Hope dan Gift of The Givers yang memberikan bantuannya pada bencana alam di Palu pada 2018 dalam rangka respon darurat, khususnya pada bidang kesehatan dan logistik. Jangka waktu yang digunakan oleh peneliti adalah pada 1 Januari 2018 hingga 31 Agustus 2019. Selain itu, kebijakan Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan berkaitan dengan bantuan kemanusiaan di Palu pada 2018 juga menjadi fokus lain pembahasan penelitian. Dampak dari regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan berkenaan dengan fungsi dari Project Hope dan Gift of The Givers terhadap masyarakat serta efek yang dirasakan oleh masyarakat terdampak termasuk ke dalam cakupan pembatasan masalah. Keputusan politik



dalam bentuk perundang-undangan dan pernyataan resmi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana peneliti gunakan dalam analisis.

### **1.2.3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai **bagaimana upaya Project Hope dan Gift of The Givers menanggulangi bencana Palu 2018 di bawah regulasi pembatasan NGO dan relawan asing yang diimplementasikan Pemerintah Indonesia?**

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan latar belakang mengapa Indonesia memilih untuk menerapkan sikap selektif terhadap bantuan asing serta bagaimana Project Hope dan Gift of The Givers melakukan perannya sebagai NGO asing dalam menanggulangi dampak bencana di Palu, khususnya bidang kesehatan, logistik, dan pencarian orang meskipun Pemerintah Indonesia menetapkan regulasi mengenai NGO dan relawan asing.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu sudut pandang baru bagi pembaca, terutama yang memiliki ketertarikan dalam penanggulangan bencana. Analisis penelitian membahas bagaimana upaya yang dilakukan Project Hope dan Gift of The Givers dalam penanggulangan bencana di bawah regulasi yang membatasi gerakannya. Tidak hanya itu, peneliti juga menganalisis kecenderungan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan bencana.

#### 1.4. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisikan beberapa literatur yang digunakan sebagai tinjauan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait isu penanggulangan bencana. Hal ini dilakukan untuk menentukan posisi dari penelitian ini diantara penelitian-penelitian serupa.

Artikel Jurnal “*Efektivitas Bantuan Luar Negeri di Aceh selama 2004-2010 setelah Tsunami Samudra Hindia Tahun 2004*” yang ditulis oleh Reza Akbar Felayati.<sup>41</sup> Artikel jurnal ini menjelaskan bagaimana keefektifan bantuan luar negeri yang telah diberikan kepada Indonesia terhadap pembangunan Aceh setelah tsunami pada tahun 2004. Rentang waktu yang dijadikan parameter adalah antara tahun 2004 hingga 2010. Peneliti berargumen bahwa bantuan yang diberikan dianggap berhasil karena 85% dari bantuan asing yang diberikan teralokasikan dengan baik. Meskipun begitu, masih terdapat kekurangan-kekurangan yang cukup vital atas pengalokasian bantuan. Penulis juga membandingkan keefektifan alokasi bantuan dengan negara Sri Lanka yang pada saat itu ikut terkena dampak dari tsunami Samudra Hindia. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan oleh INGO dalam penanggulangan bencana banyak dirasakan oleh masyarakat terdampak.

Peneliti menggunakan Artikel Jurnal “*Efektivitas Bantuan Luar Negeri di Aceh selama 2004-2010 setelah Tsunami Samudra Hindia Tahun 2004*” sebagai salah satu sumber utama untuk mengulas tindakan dan kecenderungan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ketika menanggulangi masa bencana di Aceh

---

<sup>41</sup> Reza Akbar Felayati, “Efektivitas Bantuan Luar Negeri Di Aceh Selama 2004-2010 Setelah Tsunami Samudra Hindia Tahun 2004,” *Jurnal Hubungan Internasional* Tahun IX, no. 1 (2016): 31–45.

tahun 2004. Peneliti juga meninjau upaya NGO dalam penanggulangan bencana, beserta dengan dampaknya terhadap masyarakat pada masa-masa tersebut.

Tinjauan pustaka lainnya adalah artikel jurnal “*Gotong Royong of Civil Society: The Identity Struggle in Handling the Palu Valley Disaster Response*” yang ditulis oleh Muhammad Nur Alamsyah, Muhammad Nawawi, Muhammad Zain Syamsiah, Rusmawati bte Rusdin, dan Sisrinaldi.<sup>42</sup> Para penulis melihat bahwa peran pemerintah dalam menangani bencana di Palu pada 2018 lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat dan NGO yang bergerak memberikan bantuan. Artikel jurnal ini menjelaskan mengenai bagaimana kerja sama antara masyarakat – yang memiliki budaya dan agama yang berbeda – dengan NGO, yang memiliki visi masing-masing, dalam menanggulangi bencana di Palu. Penulis berargumen bahwa gerakan dengan kerja sama mutual sebagai dasar dari hubungan tersebut memberikan kemampuan untuk bertahan hidup bagi masyarakat terdampak dalam fase tanggap darurat. Adanya pembentukan hubungan dengan pemerintah daerah melalui dukungan dan kepercayaan mutual juga menjadi faktor lain yang mendorong hal tersebut.

Fokus dari artikel jurnal “*Gotong Royong of Civil Society: The Identity Struggle in Handling the Palu Valley Disaster Response*” lebih kepada masyarakat yang terdampak bencana. Cakupan dari NGO yang dituliskan dalam artikel jurnal juga lebih luas, yakni NGO domestik dan internasional. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih berfokus pada NGO asing. Selain itu, penelitian lebih berfokus pada upaya dari NGO dalam upaya penanggulangan bencana.

---

<sup>42</sup> Muhammad Nur Alamsyah et al., “Gotong Royong of Civil Society: The Identity Struggle in Handling the Palu Valley Disaster Response,” *International Journal of Progressive Sciences and Technologies* 20, no. 2 (Mei 2020).

Artikel jurnal “*An Assessment Approach for Non-Governmental Organization in Humanitarian Relief Logistics and an Application in Turkey*” yang ditulis oleh Erkan Celik dan Alev Taskin Gumus menjadi salah satu literatur yang peneliti gunakan.<sup>43</sup> Para peneliti menjelaskan bahwa dengan kemampuan NGO dalam melakukan kesiapan dan juga menanggapi keadaan darurat, mereka dapat meminimalisir korban jiwa. Hanya saja, terdapat kekurangan, yakni sumber daya manusia. Tidak hanya itu, program yang mereka lakukan juga berpengaruh terhadap kredibilitas dan rencana program di masa depan. Dengan begitu, NGO harus mendapatkan pendekatan yang sesuai untuk melakukan evaluasi kemampuan kesiapan dan tanggap darurat mereka. Jika mereka gagal dalam melaksanakan program, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan mengancam pendanaan dan juga aspek lainnya dalam upaya tanggap darurat atau pun program yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

Dalam artikel jurnal ini, para peneliti berfokus untuk menjelaskan pendekatan yang dapat dilakukan NGO untuk bisa memaksimalkan kemampuan kesiapan dan tanggap darurat dalam penanggulangan bencana. Keduanya memperkenalkan sebuah penggabungan metode yang bisa digunakan oleh NGO untuk mengevaluasi operasi tanggap darurat. Metode ini juga hanya bisa digunakan untuk NGO dalam Turki. Jika ditinjau dengan penelitian dalam skripsi ini, fokus dari peneliti adalah upaya NGO di bawah regulasi yang membatasi bantuan, NGO dan relawan asing. Fokus penelitian lebih terfokus dan tidak luas seperti literatur.

---

<sup>43</sup> Erkan Celik dan Alec Taskin Gumus, “An Assessment Approach for Non-Governmental Organizations in Humanitarian Relief Logistics and an Application in Turkey”, *Technical and Economic Development of Economy* Vol. 24, No. 1 (2018): 1-26.

Artikel jurnal “*Lessons in Disaster Management as Learned from Korean NGOs*” yang ditulis oleh Kyoo-Man Ha juga menjadi literatur yang digunakan sebagai tinjauan pustaka.<sup>44</sup> Dalam artikel jurnal, peneliti menjelaskan bahwa NGO terbagi menjadi dua, yakni NGO yang memiliki tujuan umum dan tujuan yang spesifik. Dalam hal ini, kedua bentuk NGO sedang marak tumbuh di Korea dan berperan dalam melakukan penanggulangan bencana. Terutama, pada abad ke-21 sering terjadi bencana. NGO dengan tujuan yang umum dinilai kurang fleksibel, positif, atau pun dinamika entitasnya kurang baik dalam penanggulangan bencana jika dibandingkan dengan NGO yang memiliki tujuan spesifik. Belum lagi, jika terdapat situasi yang tidak terduga, mereka harus menghadapi berbagai permasalahan dalam mengubah organisasi. Peneliti berargumen bahwa NGO dengan tujuan yang umum harus mengubah tujuannya menjadi spesifik sehingga upaya yang dilakukan dalam penanggulangan bencana bisa lebih efektif. Tidak hanya di Korea, tetapi juga bagi NGO secara internasional.

Jika dilihat, fokus dari artikel jurnal lebih kepada dampak dari tujuan NGO terhadap upaya yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Dimana hal tersebut berkaitan dengan tindakan yang akan dilakukan, bahkan dalam situasi yang tidak terduga. Hanya saja, peneliti lebih berfokus kepada hal-hal internal dari NGO. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini, peneliti lebih berfokus kepada implikasi faktor tidak terduga tersebut, yakni regulasi pembatasan bantuan, NGO, dan relawan asing terhadap upaya yang dilakukan oleh NGO.

Literatur lain yang digunakan oleh peneliti adalah artikel jurnal “*Disasters and Non-State Actors – Human Rights-Based Approaches*” karya Marlies

---

<sup>44</sup> Kyoo-Man Ha, “Lessons in Disaster Management as Learned from Korean NGOs”, *Journal of Organizational Change* Vol. 35, No. 4 (2018): 931-943, DOI 10.1108/JOCM-10-2014-0187

Hesselman dan Lottie Lan.<sup>45</sup> Para peneliti menganalisis peran dan tanggung jawab dari aktor non-pemerintah (NSAs) dalam pemerintahan bencana berdasarkan perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (IHRL). Namun, hal yang ditekankan dalam artikel jurnal ini adalah keterlibatan NGO dan juga perusahaan dalam penanggulangan bencana. Dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa IHRL tidak hanya menjadi standar bagi NSAs dalam penanggulangan bencana, tapi NGO dan perusahaan juga secara aktif memperjelas tanggung jawab dari masing-masing dengan membentuk instrumen yang mengatur diri mereka sendiri. Tindakan ini memperjelas IHRL yang masih kurang dipahami. Tidak hanya menjelaskan peran dari NGO dan perusahaan dalam penanggulangan bencana, para peneliti juga menyebutkan bahwa pemerintah harus tetap memegang kendali dari bantuan yang diberikan oleh NGO dengan membentuk regulasi tertentu dalam upaya pengelolaan risiko bencana.

Terlihat dalam anotasi literatur bahwa fokus dari artikel jurnal adalah menjelaskan tugas dari NGO, perusahaan, dan pemerintah berdasarkan dengan IHRL dalam penanggulangan bencana. Situasi pembatasan yang dialami oleh NGO adalah hal umum dimana IHRL merupakan standar dari program yang akan dilakukan NGO dalam upaya penanggulangan bencana secara internasional. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini, regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia merupakan standar yang diterapkan hanya untuk Indonesia. Peraturan-peraturan yang mengikat lebih spesifik dan membatasi upaya yang akan dilakukan oleh NGO.

---

<sup>45</sup> Marlies Hesselman dan Lottie Lane, “Disasters and Non-State Actors – Human Rights-Based Approaches”, *Disaster Prevention and Management* Vol. 26, No. 5 (2017): 526-539, DOI 10.1108/DPM-07-2017-0174

Berdasarkan literatur-literatur terdahulu yang juga membahas penanggulangan bencana, terlihat bahwa fokus analisis lebih banyak membahas tindakan pemertintah atau INGO. Bahkan terdapat beberapa yang secara spesifik membahas Indonesia dalam analisisnya. Hanya saja, dari beberapa peneilitan-penelitian tersebut, jarang yang memperdalam upaya INGO dalam melakukan panggulangan bencana dalam situasi yang terbatas. Hal ini yang kemudian peneliti analisis dalam skripsi ini.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan sebuah alat bagi peneliti untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam analisis yang diuraikan. Menurut Robert Cox, teori merupakan alat untuk memahami lingkungan kita dan, yang terpenting, sebagai dasar perubahan yang bisa diberikan kepada dunia.<sup>46</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan konsep *human security* yang digagas oleh Program Pembangunan Persatuan Bangsa-Bangsa (UNDP), teori *muddling through* yang dijelaskan oleh Charles E. Lindblom, dan konsep peran Organisasi Non-Pemerintah (NGO) dalam penanggulangan bencana menurut Rajib Shaw.

Konsep *human security* pertama kali digagas oleh UNDP. Dalam pertemuan tahun 1994, UNDP menggagas *human security* sebagai salah satu pendekatan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menjamin negara untuk berkomitmen dalam menjaga dan meningkatkan keamanan dari individual.<sup>47</sup> Tidak hanya itu, terdapat tiga konsep yang digunakan oleh UNDP dalam mempromosikan

---

<sup>46</sup> Peter Hough et al., *International Security Studies: Theory and Practice* (London; New York: Routledge, 2015).

<sup>47</sup> *Ibid.*

*human security*, yakni bebas dari rasa takut, bebas dari kekurangan, dan kebebasan untuk hidup bermartabat.<sup>48</sup>

UNDP menyebutkan beberapa penyebab terganggunya *human security*, diantaranya adalah bencana alam, konflik bersenjata, kemiskinan berkelanjutan, pandemik, hingga terorisme internasional. PBB melihat bahwa pendekatan *human security* bisa mendorong negara anggota untuk meningkatkan kesadaran terhadap perubahan iklim dan bencana alam; meningkatkan perdamaian dan masyarakat yang inklusif; menangani penyebab yang mendasari kemiskinan berkelanjutan; dan memperkuat perubahan krisis kemanusiaan menjadi pembangunan berkelanjutan jangka panjang.<sup>49</sup> *Human security* menekankan pada perlindungan individual, hak asasi manusia, pembangunan sosial, menghilangkan kekerasan, perselisihan sosial, dan segala jenis diskriminasi.<sup>50</sup> *Human security* memerlukan pemahaman yang lebih luas tentang ancaman dan mencakup penyebab ketidakamanan yang berkaitan dengan misalnya keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, kelompok, dan politik.<sup>51</sup> Peneliti menggunakan konsep *human security* dalam menganalisis latar belakang dari ditetapkannya regulasi dalam penanggulangan bencana.

Teori *muddling through* merupakan sebuah teori yang menjelaskan mengenai bagaimana pembentuk kebijakan membuat sebuah kebijakan dengan melakukan komparasi terhadap kebijakan sebelumnya. Dalam hal ini, Lindblom

---

<sup>48</sup> Human Security Unit, *Human Security Handbook* (New York: United Nations, 2016), <https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2017/10/h2.pdf>.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Pierre Sané dan Moufida Goucha, *Human Security: Approaches and Challenges*, (Perancis: UNESCO Publishing, 2008).

<sup>51</sup> United Nations Human Security Unit, *Human Security in Theory and Practice: Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security*, (New York: United Nations, 2009).



menjelaskan bahwa pada awalnya, para pembentuk kebijakan akan membentuk daftar nilai-nilai yang berkaitan dengan sebuah isu. Lalu, kemungkinan dari seluruh kebijakan yang ada akan digunakan untuk memaksimalkan nilai-nilai tersebut, baik kebijakannya lebih efisien atau pun kurang efisien. Dengan begitu, mereka akan bisa menguraikan banyak kemungkinan dari kebijakan alternatifnya. Ketika beberapa alternatif sudah didapatkan, para pembentuk kebijakan akan membandingkan secara sistematis untuk kemudian mengetahui manakah yang lebih mencakup banyak nilai. Dalam melakukan perbandingan, pembentuk kebijakan akan menggunakan banyak teori yang kemudian bisa menggeneralisasi kelas-kelas kebijakan. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa dalam membentuk kebijakan ini, kepentingan pribadi atau pun kelompok yang direpresentasikan oleh pembentuk kebijakan masuk ke dalamnya.<sup>52</sup>

Konsep NGO, dalam buku *International Organization* yang ditulis oleh Clive Archer, dijelaskan sebagai sebuah organisasi yang memiliki keanggotaan aktor non-negara.<sup>53</sup> NGO juga didefinisikan sebagai organisasi non-profit, swasta, dan independen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka yang membutuhkan.<sup>54</sup> NGO memiliki peran tersendiri dalam beberapa situasi. Rajib Shaw menjelaskan mengenai peran dari NGO dalam penanggulangan bencana. Konsep peran NGO digunakan peneliti untuk menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh Project Hope dan Gift of The Givers dalam pengupayaan bantuan di bawah

---

<sup>52</sup> Charles E. Lindblom, "The Science of "Muddling Through"", *Public Administration Review* Vol. 19, No. 2 (1959): hlm. 79-88.

<sup>53</sup> Clive Archer, *International Organizations* (New York: Taylor & Francis, 2001).

<sup>54</sup> David Lewis dan Nazneen Kanji, *Non-Governmental Organizations and Development* (London ; New York: Routledge, 2009).

regulasi pembatasan NGO dan relawan asing yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Menurut Rajib Shaw, NGO memiliki peran tersendiri dalam tiga tahap penanggulangan bencana. Pada tahap pertama, yakni sebelum terjadinya bencana, terdapat dua fase di dalamnya, yakni fase pencegahan dan kesiapan. Untuk perannya sendiri, dalam fase pencegahan, NGO memiliki tugas dalam mitigasi dan kesadaran. Sedangkan dalam fase kesiapan, sesuai dengan namanya, peran dari NGO adalah untuk kesiapan. Peran ini dilakukan oleh NGO dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tindakan yang harus dilakukan ketika terjadinya bencana.

Lalu, tahap kedua, yakni saat terjadinya bencana. Fase yang ada dalam tahapan ini adalah tanggap darurat. Peran NGO dalam tahap ini adalah dengan melakukan operasi penyelamatan dan bantuan. Upaya yang dapat dilakukan NGO dalam tahap tanggap darurat adalah dengan datang ke daerah terdampak dan menyelamatkan masyarakat yang membutuhkan bantuan serta mengirimkan bantuan medis. NGO juga berperan penting dalam membantu masyarakat yang tidak terjangkau oleh sistem mekanisme bantuan yang diterapkan oleh pemerintah.

Selanjutnya, pada tahap terakhir, yakni tahapan setelah bencana. Fase dan peran dari NGO setelah terjadinya bencana adalah dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam hal ini, NGO bekerjasama dengan pemerintah negara terdampak untuk mengembalikan kehidupan masyarakat, baik ekonomi hingga kesehatan mental, dengan berbagai program pembangunan jangka panjang. Upaya

yang dapat dilakukan oleh NGO bergantung kepada kebutuhan dari masyarakat dan pemerintah negara terdampak.<sup>55</sup>

## **1.6. Metode Penelitian, Jenis Penelitian, dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang menekankan pada pemahaman dunia sosial melalui interpretasi dari para partisipan atau subjek penelitian.<sup>56</sup> Selain itu, metode ini mendukung adanya studi mendalam mengenai sebuah peristiwa atau fenomena tertentu. Secara umum, metode ini juga lebih terbuka dalam penggunaan bukti atau keterangan pendukung dalam penelitian.<sup>57</sup> Tujuan dari sebuah penelitian kualitatif sendiri, menurut John W. Creswell, yakni untuk mendapatkan pemahaman, penafsiran, dan penemuan dari sebuah makna, proses, dan konteks suatu perilaku atau interaksi sosial.<sup>58</sup>

### **1.6.2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian dengan desain deskriptif digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai sebuah fenomena dan menjelaskan secara mendalam faktor-faktor dalam fenomena tersebut dengan variabel atau sebuah kondisi dalam situasi tertentu. Jenis penelitian ini pada

---

<sup>55</sup> Rajib Shaw, "Role of Non-Government Organizations in Earthquake Disaster Management: An Asian Perspective," *Regional Development Dialogue*, 2017.

<sup>56</sup> Alan Bryman, *Social Research Methods*, 4th ed. (New York: Oxford University Press, 2012).

<sup>57</sup> W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 7th ed. (Harlow, Essex: Pearson Education Limited, 2014).

<sup>58</sup> John W. Creswell dan Cheryl N Poth, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among Five Approaches*, 4th ed. (Los Angeles, Ca: Sage Publication Inc, 2018).

umumnya digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai apa dan bagaimana.<sup>59</sup>

### 1.6.3. Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara. John W. Creswell menjelaskan bahwa literatur terdiri dari arsip umum dan pribadi yang menghasilkan partisipasi dalam sebuah studi. Arsip tersebut termasuk koran atau platform berita lainnya, cuplikan pertemuan, jurnal pribadi, dan surat. Menurut Creswell, dokumen merupakan sumber yang baik bagi studi kualitatif. Hal ini dikarenakan data sudah memiliki makna dari partisipan lain yang biasanya sudah memberikan perhatian lebih terhadap apa yang ditulis.<sup>60</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan anggota dari masing-masing NGO. Menurut Creswell wawancara merupakan kegiatan di mana peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada seorang atau lebih yang bersifat *open-ended* dan umum yang kemudian mencatat jawabannya. Peneliti kemudian mengubah hasil jawaban tersebut menjadi transkrip data untuk kemudian di analisis.<sup>61</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Dr. Ahmed Bham selaku penanggung jawab bantuan bencana dari Gift of The Givers serta Bu Alia selaku koordinator bantuan medis dan Bu Nurhayati selaku penanggung jawab logistik dari Yayasan Project Hope Indonesia.

---

<sup>59</sup> Dr. Robert V. Labaree, "Research Guides: Organizing Academic Research Papers: Purpose of Guide," Sacred Heart University, diakses pada 16 April 2021, <https://library.sacredheart.edu/c.php?g=29803&p=185901>.

<sup>60</sup> John W Creswell, *Educational Research : Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, 4th ed. (Harlow: Pearson Education Limited, 2014).

<sup>61</sup> *Ibid.*

## **1.7. Sistematika Pembahasan**

Pada skripsi ini, hasil penelitian terbagi menjadi beberapa bab. Bab I berisikan tujuh sub-bab, yakni latar belakang; identifikasi masalah; tujuan dan kegunaan penelitian; tinjauan pustaka; kerangka penelitian; metode penelitian, teknik pengambilan data, dan jenis penelitian; serta sistematika pembahasan. Dilanjutkan dengan bab II yang berisikan informasi mendalam mengenai Project Hope dan Gift of The Givers serta upaya penanggulangan bencana alam yang pernah dilakukan di Indonesia. Lalu, pada bab III peneliti menjelaskan mengenai penetapan regulasi oleh Pemerintah Indonesia, perbandingannya ketika bencana tsunami Aceh pada 2004, dan kemungkinan hal-hal yang melatar belakangi di balik penetapan regulasi tersebut. Bab IV berisikan fokus dari penelitian, yaitu pengupayaan bantuan oleh Project Hope dan Gift of The Givers di bawah regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Bab V berisikan kesimpulan dari hasil keseluruhan analisis. Kemudian ditutup dengan hasil wawancara dan daftar pustaka dari sumber-sumber yang digunakan oleh peneliti.

